



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
ADIGIUM.....	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	
DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN	
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Metode Penelitian	8
1.3.1 Tipe penelitian.....	8
1.3.2 Pendekatan masalah.....	8
1.3.3 Sumber bahan hukum	10
1.3.4 Pengumpulan dan pengolahan bahan hukum	13
BAB II. <i>IMPEACHMENT</i> SERTA PENERAPANNYA DALAM LINGKUP PEMERINTAHAN DAERAH	
2.1 Konsep <i>Impeachment</i> dan Pemakzulan Kepala Daerah.....	15
2.2 Kedudukan Kepala Daerah dan DPRD dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia.....	24

2.3 Hubungan Kedudukan Antara Kepala Daerah dan DPRD	27
2.4 Fungsi dan Hak DPRD Terkait <i>Impeachment</i> Kepala Daerah.....	32

BAB III. PELAKSANAAN WEWENANG *IMPEACHMENT* OLEH DPRD

3.1 <i>Impeachment</i> Kepala Daerah oleh DPRD Menurut Undang-Undang	48
3.2 Study Kasus <i>Impeachment</i> Kepala Daerah di Indonesia	62
3.2.1 Usulan pemberhentian Gubernur Jakarta periode 2012-2017 “Basuki Tjahaja Purnama”	62
3.2.2 Pemakzulan Bupati Karo ke-18 periode 2011-2014 “Kena Ukur Surbakti”	72

BAB IV. PENUTUP

4.1 Kesimpulan	81
4.2 Saran	84

DAFTAR BACAAN

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

TAP MPRS No. XXI/MPRS/1966 tentang Pemberian Otonomi Seluas-Luasnya Kepada Daerah.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Kedudukan Mengenai Komite Nasional di Daerah.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Penetapan Aturan-Aturan Pokok Mengenai Pemerintahan Sendiri di Daerah-Daerah yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1143).

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2778).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Pemerintahan di Daerah (Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037).

Undang-Undang nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839).

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851).

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 243, Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589).

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678).

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4569).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104).

Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2005 tentang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah.

Keputusan Presiden Republik Indonesia 5 Juli Tahun 1959 tentang Kembali Pada Undang-Undang Dasar 1945.

Keputusan Presiden Nomor 57/P Tahun 2014 tentang Pemberhentian Kena Ukur.

DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XII/2014 tentang Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
2. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 P/Khs/2013 tentang Pemberhentian Terhadap Bupati Kabupaten Garut Aceng Fikri.
3. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 P/Khs/2014 tentang Pemberhentian Terhadap Bupati Kabupaten Karo Kena Ukur Surbakti.